



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M ZAINUDDIN
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 432376

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 18.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 359 m²/225 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/112 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000
3. Tanah Seluas 389 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
4. Tanah Seluas 213 m² di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 8.820 m² di KAB / KOTA BOJONEGORO, WARISAN Rp. 380.000.000
6. Tanah Seluas 40.000 m² di KAB / KOTA GRESIK, WARISAN Rp. 12.160.000.000
7. Tanah Seluas 217 m² di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 562.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ JAZZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SOUL 2015 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



3. MOTOR, YAMAHA SOUL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.		
5.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2021, HASIL		
SENDIRI Rp. 460.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	115.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	19.477.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	19.477.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.